

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI INDONESIA

Aris D. Rimbe
(Dosen STT Injili Arastamar Mamasa)

Abstract

Talking about Education will always attract the attention of many people because it is always accompanied by various interests. In Indonesia, for example, the attention of a number of people will begin to focus on the new policy of the Minister of Education, namely Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. There are new things, there are things that have been made for a long time but not done. Every era of government there is always a new policy. This is what makes many parents confused, including practitioners and practitioners of Education in this country.

Christian education is part of the Indonesian education system and needs to find a place in line with other disciplines. Unfortunately, not everyone who is involved in education really pay attention to Christian education. It is very concerning that the knowledge of morality and strengthening of faith and belief does not get an equal share in this country. The presence of new policies becomes a big question, can the religious element still be the main choice in the aspect of education development in Indonesia? Or will it just be a side option without taking into account other aspects

Key words: independence, policy, Education, christianity

Abstrak

Berbicara mengenai Pendidikan akan selalu mengundang perhatian banyak orang karena selalu disertai dengan berbagai kepentingan. Di Indonesia misalnya, perhatian sejumlah orang akan mulai focus kepada kebijakan baru Menteri Pendidikan, yaitu Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ada hal yang baru, ada hal yang sesungguhnya sudah lama dibuat namun tidak terlaksana. Setiap era pemerintahan selalu ada kebijakan baru. Inilah yang membuat banyak orang tua menjadi bingung, termasuk praktisi dan pelaku Pendidikan di negeri ini.

Pendidikan agama Kristen menjadi bagian dalam sistem Pendidikan Indonesia perlu mendapat tempat sejajar dengan disiplin ilmu lainnya. Sayangnya, tidak semua orang yang berkecimpung dalam dunia Pendidikan sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Pendidikan agama Kristen. Sangat memprihatinkan kalau ilmu tentang akhlak dan penguatan iman serta keyakinan tidak mendapat porsi yang sejajar di negeri ini. Hadirnya kebijakan baru menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah unsur religious masih dapat menjadi pilihan utama dalam aspek perkembangan Pendidikan di Indonesia? Ataukah hanya akan menjadi pilihan sampingan tanpa memperhitungkan aspek lain?

Kata kunci: *Merdeka, Kebijakan, Pendidikan, kristen*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat secara eksplisit menyatakan, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi beban untuk kebaikan pemerintahan Indonesia. Dalam historis perkembangan pendidikan Indonesia, memang sejak dulu Indonesia jauh tertinggal pendidikannya dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan beberapa negara di Asia. Sehingga pada zaman kolonialisme dulu banyak pemikir dari Indonesia itu belajar ke luar negeri untuk belajar dan walaupun ada di Indonesia sekolah-sekolah itu hanya untuk orang-orang Belanda dan keluarga Indonesia yang tergolong kaum ningrat.

Setelah Indonesia merdeka pendidikan itu pun mulai dibangun, pada zaman orde lama, orde baru dan hingga saat ini mencerdaskan kehidupan bangsa mengarah pada arah yang semakin baik namun tetap saja belum maksimal, perubahan kebijakan-kebijakan melakukan penyeimbangan pendidikan di seluruh Indonesia turut diupayakan demi beban menunaikan beban moral pemerintahan yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tetapi sampai saat ini kualitas pendidikan negara Indonesia masih saja tertinggal dari negara-negara lain, tentu saja ada faktor penyebab sehingga kualitas Pendidikan Indonesia masih saja tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Sebuah penelitian yang menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia jauh di bawah negara-negara lain, misalnya riset dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama Results Internasional menyebut ada tiga permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Masing-masing, yakni kualitas guru, sekolah yang tidak ramah anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal.¹ Padahal seharusnya setiap orang berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan yang sama dengan yang lain, hal ini senada dengan pendapat Horace Mann yang merupakan ahli Pendidikan dari Massachusetts.²

Selain hal tersebut di atas Ubait menyebut, penelitian RTEI mengukur lima faktor utama, yakni pemerintahan, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptasi. Dari lima faktor itu, Indonesia mendapatkan skor 77 persen untuk laporan pendidikan. Namun, posisi Indonesia sejajar dengan Nigeria dan Honduras. Ironisnya, ia menyebut, kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah Filipina (81 persen) dan Etiopia (79 persen). Penelitian itu menempatkan Inggris (87 persen) di urutan teratas. Disusul, Kanada (85 persen) dan Australia (83 persen). Ubaid menjelaskan, kualitas guru yang rendah disebabkan rasio ketersediaan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Secara keseluruhan perjalanan Indonesia menapaki tiap zaman, pendidikan dalam perubahan yang mengarah pada kemajuan. Ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan pemerintah mulai dari program wajib belajar, beasiswa kepada masyarakat kurang mampu dan program-program yang mengupayakan peningkatan kualitas sejauh ini sudah dilakukan, tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah ke mana arah pendidikan Indonesia saat ini, dan mengapa kemudian pendidikan Indonesia melakukan perubahan-perubahan system, apa urgensinya sehingga perubahan sistem itu dilakukan, padahal menurut perspektif penulis sistem itu tidak perlu dirubah karena yang perlu dirubah adalah orang-orang yang menjalankan sistem itu sendiri dalam pengaktualisasiannya.

Pada dasarnya sistem itu dibuat ketika memang dijalankan dengan benar maka tujuan dari sistem itu sendiri akan tercapai, perlu penegasan dalam menjalankan revolusi mental bagi tiap-tiap orang yang di pertanggungjawabkan untuk menjalankan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri dan butuh penataan yang baik secara kompleks hingga ke daerah-daerah sehingga pendidikan itu sama tugas pokok dan fungsinya dikonsumsi oleh masyarakat, selanjutnya perlu sebuah penetapan untuk tujuan pendidikan tersebut, bercermin dari sejarah bahwa dulu

¹ Ubaid Matraji (Koordinator Nasional JPPI) dalam Seminar Internasional dan Laporan Right to Education Index (RTEI) 2016 di Jakarta.

² Iris V. Cully. *Dinamika Pendidikan Kristen*. BPK GM. 2015. Hal. 5

pendidikan di Yunani itu diarahkan dengan tujuan pertahanan saja sehingga sistem pendidikan mereka diatur secara sistematis dan terfokus kepada pertahanan.

Yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan adalah ke mana arah Pendidikan di Indonesia? Apakah ke arah ekonomi politik atau ke pertahanan, atau mungkin saja melihat kondisi sekarang ini banyak sekali disiplin ilmu yang ada di Indonesia, arah pendidikan kita lebih kepada meningkatkan semua sektor. Oleh karena banyaknya ilmu pengetahuan (dalam kurikulum), sehingga tidak semua dapat diaktualisasikan secara maksimal dalam mewujudkannya sementara pemerataan di seluruh wilayah belum terjadi hingga saat ini. Persoalan tersebut akhirnya menjadi beban pemikiran seluruh pihak terkait, khususnya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah mengeluarkan kebijakan yang dianggap masyarakat sangat revolusioner sehingga kebijakan ini hangat dibicarakan di ruang publik. Program tersebut yaitu program “Merdeka Belajar”, yang mana program ini diwujudkannyatakan dalam kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 dan digantikan dengan sistem penilaian Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter, “Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum dimana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum”.³

Terdapat sejumlah alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nadiem Makarim) yang menguatkan kebijakan merdeka belajar yang hendak diterapkan, bahwa di masa sekarang ini nilai bukanlah penentu kompetensi seseorang, akreditasi bukan juga menjadi tolak ukur kemampuan yang baik, dukungan atas kebijakan ini mulai dating dari masyarakat luas baik dari pendidik maupun siswa dan mahasiswa. Meskipun program baru itu telah diapresiasi sejumlah kalangan, tetapi masih ada juga yang kurang setuju dengan mempertimbangkan respon siswa akan semakin sedikit dan berkurang motivasi belajarnya. Sebagian masyarakat menilai, bahwa Ujian Nasional tetap menjadi tolak ukur kompetensi siswa.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan melalui atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tempat penelitian, antara lain di SMK Pertanian Malatiro dan SDN 012 Limba Debata keduanya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021.

PEMBAHASAN

Pendapat filsuf sebagaimana diungkapkan oleh Plato, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membawa orang-orang sederhana keluar dari pikiran mereka menuju terang dan akhirnya memimpin dunia.⁴ Begitu banyak masalah yang muncul dalam dunia Pendidikan Indonesia, misalnya masalah kurikulum dan pembelajaran yang tidak pernah terselesaikan. Masalah-masalah ini pada akhirnya membawa dampak negatif terhadap pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, tanpa mengecualikan Pendidikan Agama Kristen (PAK). Pendidikan Agama Kristen

³ Kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam peluncuran empat pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12/2019)

⁴ Ferry Yang, *Pendidikan Kristen*. Momentum. 2018. Hal. 5

adalah upaya untuk mempertemukan anak-anak kepada Yesus Kristus sehingga dengan pertemuan itu ada pertobatan sejati melalui kuasa Roh Kudus.⁵

Namun demikian, pendidikan agama Kristen harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, di era globalisasi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan, Pendidikan Agama Kristen harus murni untuk menyampaikan berita Keselamatan yang diterjemahkan sesuai dengan objek yang menerima pendidikan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anak kita, gereja serta bangsa ini, karena kita mendidik mereka menurut jalan yang dikehendaki-Nya (Amsal 22:6) dan kita percaya Roh Allah bekerja dalam diri setiap anak-Nya.

Sejujurnya, kalau dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu banyak, sehingga mengakibatkan sisi buruk bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Selain itu, siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya, daya saing siswa akan berkurang. Nampaknya, siswa hanya menguasai materi dalam sekejap karena kebutuhan ujian, namun setelah itu tidak ingat lagi atau bahkan tidak dapat mengaplikasikannya lagi untuk masa yang akan datang.

Persoalan tentang kurikulum di Indonesia semakin kompleks karena sering sekali mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Bahkan, pengubahan nama kurikulum justru memberi kesempatan dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan bergantinya nama kurikulum yang ada di Indonesia ternyata tidak memberikan manfaat pada proses pendidikan yang ada di Indonesia karena dengan melihat kejadian nyata di lapangan malah menjadi masalah bagi sekolah-sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya. Memperhatikan sarana dan prasarana, hal ini berkaitan dengan kurangnya pemerataan yang dilakukan Mendikbud. Selain itu, pemerataan pendidikan juga ditinjau dari segi Satuan Tingkat Pendidikannya. Hal ini berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah pada Tingkat Satuan Pendidikan tertentu.

Pada tingkat Sekolah Dasar, siswa diajarkan seluruh konsep dasar seperti membaca, menulis, menghitung dan menggambar. Pada tingkat ini siswa cenderung hanya diajarkan saja, tetapi tidak mengena pada pemaknaannya. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, pelajaran yang diajarkan cenderung hanya berupa konsep pada tujuan agar anak mampu mengerjakan soal bukan konsep agar siswa mampu memahami soal.

Seperti diketahui sejumlah pihak, bahwa kurikulum merupakan sebuah acuan yang dibuat secara nasional dan menjadi dasar pijakan setiap sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan tujuan agar terjadinya pemerataan terhadap pengetahuan siswa yang ada di seluruh Indonesia, namun ada yang lucu di dalam pelaksanaan kurikulum yang ada di Indonesia yaitu menjalankan dua kurikulum dalam satu tahun ajaran pendidikan, ini merupakan salah satu masalah yang sangat besar yang harus di perhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pendidikan yang ada di Indonesia.

Selama ini, kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Karena itu, perhatian para guru, dosen, hingga praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal

⁵ Robert Boehlke. 1997. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik PAK, dari Yohannes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Hal. 785

kurikulum bukanlah penentu utama dari keberhasilan suatu pendidikan. Sekalipun kurikulum juga sebagai penentu kesuksesan, tapi kasus yang terjadi di negeri kita ini adalah kesadaran. Kesadaran untuk berprestasi, kesadaran untuk sukses, kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan kesadaran untuk menghilangkan kebodohan.

Hingga saat ini, Indonesia sudah mengalami banyak perubahan kurikulum pendidikan. Mulai kurikulum KBK, KTSP, hingga yang terbaru saat ini adalah K-13 yang masih menimbulkan pro kontra dan bahkan banyak sekolah yang pada akhirnya kembali lagi pada KTSP, karena bahkan guru pun banyak yang tidak sanggup untuk menjalankan program ini. Sebenarnya kurikulum yang memiliki posisi sentral dalam pendidikan ini menunjukkan bahwa kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara peserta didik, pendidik, sumber dan lingkungan. Dan jika seseorang ingin mengetahui apa yang dihasilkan, atau pengalaman belajar yang didapatkan, maka dia harus mengkaji dan mempelajari kurikulum lembaga pendidikan tersebut.

Selain masalah kurikulum, Pendidikan Indonesia juga dikelilingi masalah dari aspek guru antara lain, masalah kualitas dan masalah kesejahteraan menjadi dilemma dalam dunia Pendidikan Indonesia.⁶ Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.

Persoalan Pendidikan di Indonesia tidak hanya pada aspek kurikulum dan guru semata, tetapi juga aspek orang tua. Orang tua merupakan tempat anak menerima pendidikan yang pertama dalam proses menerima pengetahuan dan tidak hanya itu, orang juga menjadi ikon terpenting dalam menentukan masa depan seorang anak, namun perkembangan pendidikan yang semakin pesat dan semakin rumit membuat orang tua sulit mengendalikan sikap dan menerapkan tanggung jawab untuk anaknya.

Peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar anak dan prestasi belajar yang akan dicapai. Hasil penelitian Baker dan Stevenson menunjukkan bahwa, peran atau partisipasi orang tua memberikan pengaruh baik terhadap penilaian guru kepada siswa. Orang tua mempunyai peran serta untuk ikut menentukan inisiatif, aktivitas terstruktur di rumah untuk melengkapi program-program pendidikan di sekolah sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Selain itu, juga dinyatakan bahwa jaringan komunikasi yang dibangun oleh orang tua sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa di masyarakat.

Masalah biaya pendidikan menjadikan alasan orang tua terhalang dalam mengembangkan kemampuan anak, sebabnya anak tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi sehingga orang tua memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menambah jumlah pengangguran. Diharapkan dengan kenyataan seperti ini pemerintah harus mampu memberikan kontribusi terhadap proses perubahan sistem pendidikan di Indonesia, tidak hanya itu pemerintah juga harus mampu mempertimbangkan terhadap kebijakan apa yang dikeluarkan dan harus dimbandingkan dengan letak geografis satuan pendidikan.

⁶ Ubaid Matraji (Koordinator Nasional JPPI) dalam Seminar Internasional dan Laporan Right to Education Index (RTEI) 2016 di Jakarta.

Pemberlakuan UU otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan.

Dengan adanya peraturan di atas telah banyak memberi dampak negatif, salah satu contoh pemerintah daerah kurang memperhatikan pendidikan dan tidak mau memikirkan tentang bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan pendidikan, pemerintah seharusnya mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat terdidik agar bisa mengembangkan kemampuannya di daerah masing-masing, namun pada kenyataannya pendidikan menjadi korban politik oleh para pemerintah daerah, kasus tersebut telah membawa dampak besar bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada setiap daerah.

Untuk mengatasi isu kritis perihal mutu (layanan) pendidikan, maka pihak-pihak terkait antara lain pemerintah, *Civil Society*, dan seluruh stakeholder di bidang pendidikan perlu bersinergi untuk mencari langkah-langkah strategis pencapaian mutu layanan pendidikan seperti diamanatkan oleh Pasal 31 Amandemen UUD 1945, Pasal 28 Konvensi Hak Anak (KHA), dan Pasal 12 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sekaligus menjadi arah dan dasar kebijakan pendidikan nasional.

Pandangan Tokoh Pendidikan

Berikut ini Penulis menyajikan pandangan dua tokoh pendidikan dunia yang telah memberikan banyak kontribusi dunia pendidikan yang masih tetap hampir seluruh dunia.

a. Paulo Friere

Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi (*selfaffirmation*) yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah, sebuah gagasan yang berasal dari kritiknya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas.

Menurut Freire, sebagian besar warga masyarakat masih bersikap masa bodoh terhadap perkembangan lingkungannya. Kehidupan mereka masih dalam keadaan tertekan oleh tingkat sosial-ekonomi yang rendah. Kehadiran para peserta didik dan lulusan pendidikan sekolah di masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan makin timbulnya masyarakat yang tertekan ini. Dimana, seolah-olah terjadi pola interaksi antara dua kelompok manusia di masyarakat, yaitu kelompok penekan dan kelompok yang merasa tertekan.

Freire berasumsi, sepanjang dua kelompok tersebut masih tetap ada, maka mereka tidak mungkin dapat berkembang secara demokratis, kreatif, dan dinamis. Karena, kelompok penekan mungkin tidak akan mampu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat apabila sebagian besar warganya masih merasa tertekan. Pihak penekan juga akan mengalami kesulitan dalam menyadarkan masyarakat yang merasa tertekan untuk dapat mengenali masalah yang dihadapi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah yang timbul dalam realitas kehidupan mereka. Sebaliknya, pada kelompok yang merasa tertekan, seakan-akan telah terbiasa berada dalam "penjara" kehidupan yang statis dan masa bodoh. Mereka tidak mampu untuk mengenali dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Suasana kehidupan masyarakat yang merasa tertekan, yang pada umumnya menderita kemiskinan dan keterlantaran pendidikan, serta berada dalam "*kebudayaan bisu*".

Konsep mengenai penyadaran atau *conscientization* digunakan untuk membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat terhadap lingkungannya. Kesadaran ini ditumbuhkan melalui gerakan pendidikan pembebasan. Dimana dalam gerakan pendidikan ini, warga masyarakat sebagai peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif dan berpotensi, bukan sebuah objek yang hanya sebagai penerima sesuatu secara pasif. Pendidikan pembebasan dilakukan dengan menghindarkan semua faktor yang dapat menimbulkan adanya perbedaan antara pihak penekan

dengan pihak yang merasa tertekan. Sedangkan untuk gagasan pendidikan dengan pengajuan masalah atau *problem posing education*, adalah sebuah gagasan yang dianjurkan dalam rangka mengatasi gaya belajar yang Freire anggap sebagai pendidikan “gaya bank”.

b. Jhon Dewey

Berbeda dengan Friere, konsep pendidikan Dewey memberi prioritas pada kegiatan yang bermakna dalam pembelajaran dan partisipasi dalam demokrasi kelas. Tidak seperti model pengajaran sebelumnya, yang mengandalkan otoritarianisme dan hafalan, pendidikan progresif menegaskan bahwa siswa harus diinvestasikan dalam apa yang mereka pelajari. Dewey berpendapat bahwa kurikulum harus relevan dengan kehidupan siswa. Dia melihat belajar dengan melakukan dan mengembangkan keterampilan hidup praktis sebagai hal penting untuk pendidikan anak-anak. Beberapa kritikus berasumsi bahwa, di bawah sistem Dewey, siswa akan gagal memperoleh keterampilan dan pengetahuan akademik dasar. Yang lain percaya bahwa tata ruang kelas dan otoritas guru akan hilang.

Bagi Dewey, keharusan etis sentral dalam pendidikan adalah demokrasi. Setiap sekolah, seperti yang ditulisnya di *The School and Society*, harus menjadi “kehidupan komunitas embrio, aktif dengan jenis pekerjaan yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang lebih luas dan meresap ke seluruh dengan semangat seni, sejarah dan sains. Ketika sekolah memperkenalkan dan melatih setiap anak masyarakat untuk menjadi anggota dalam komunitas kecil seperti itu, menjenuhkannya dengan semangat pelayanan, dan memberinya instrumen pengarahan diri sendiri yang efektif, kita akan memiliki jaminan terdalam dan terbaik dari masyarakat yang lebih besar yang layak, menyenangkan dan harmonis.”

Dalam bukunya *Democracy and Education* (1916), Dewey menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. “Dewey elaborated upon his theory that school reflect the community and be patterned after it so that when children graduate from school they will be properly adjusted to assume their place in society.”

Kutipan di atas dapat dipahami secara bebas, bahwa pendidikan harus mampu membekali anak didik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lingkungan sosialnya. Sehingga, apabila anak didik tersebut telah lulus dari lembaga sekolah, ia bisa beradaptasi dengan masyarakatnya.

Untuk merealisasikan konsep tersebut, Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran. Pertama, *problem solving method*. Dengan metode ini anak dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah-masalah yang menantang, dan anak didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Dalam proses belajar mengajar, dengan model ini guru bukannya satu-satunya sumber, bahkan kedudukan seorang guru hanya membantu siswa dalam memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Melalui metode semacam ini, dengan sendirinya pola lama yang hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya pusat informasi (metode pedagogy) diambil alih kedudukannya oleh metode andragogy yang lebih menghargai perbedaan individu anak didik. Kedua, *Learning by doing*. Konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Supaya anak didik bisa eksis dalam masyarakat bila telah menyelesaikan pendidikannya, maka mereka dibekali keterampilan-keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosialnya.

Dampak kebijakan “merdeka belajar” bagi dunia Pendidikan Indonesia

Meskipun istilah merdeka belajar merupakan sesuatu yang baru namun tetap menjadi program utama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi menjadi paket penting. Pada Perguruan Tinggi, meskipun tidak sederhana yang dipikirkan, tetapi merdeka Belajar dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang sesuai yang mereka butuhkan. Dengan demikian diharapkan akan tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Mahasiswa diberikan kesempatan maksimal 40 SKS untuk belajar dan berlatih di luar kampus, ditambah lagi 20 SKS di luar Program Studinya. Sudah barang tentu hal ini sebagai upaya agar kurikulum kampus lebih dekat dan sesuai dengan standard dan kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, bahwa mahasiswa dipersiapkan tidak hanya menguasai satu bidang ilmu tetapi lebih sehingga bisa bersaing di dalam dunia kerja. Dalam praktiknya yaitu dengan menambah porsi vokasional melalui blended kurikulum akademik-vokasional.

Sesungguhnya, program ini mirip dengan konsep *link and match* yang sangat populer di tahun 90-an era Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro (1992-1998). Namun yang menjadi pembeda adalah pada keluasan cakupan kegiatan pembelajaran luar kampus yang dapat direkognisi sebagai kegiatan pembelajaran dan kebebasan mahasiswa dalam memilih bidang kegiatan yang diinginkan. Setiap kebijakan baru sudah barang tentu akan membawa konsekwensi-konsekwensi baik terkait dengan infrastruktur pendukung maupun mindset para pelaksananya. Dari sisi kurikulum, Perguruan Tinggi perlu menyesuaikan dengan melakukan harmonisasi kurikulum berjalan dengan Merdeka Belajar.

Kurikulum yang selama ini didesain untuk perkuliahan di program studi dan belum mengakomodasi berbagai kegiatan mahasiswa luar kampus sebagai kegiatan pembelajaran kurikuler perlu segera menyesuaikan. Ada baiknya dengan Merdeka Belajar program studi yang selama ini tidak melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan alasan ada mata kuliah magang/praktik industri, dll. bisa memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam kurikulum tanpa menghilangkan kegiatan magang dari kurikulum. Perlu diingat, Merdeka Belajar mengamanatkan kepada pihak kampus agar menyediakan kegiatan luar kampus sekitar 40 SKS. Perlu diperhatikan *learning outcome* kurikulum tetap berorientasi kepada pencapaian kompetensi berpikir tinggi (*high order thinking skills*) menghadapi era transformasi digital ini.

Konsekwensi logis dari perubahan ini, sangat mungkin akan terjadi pengurangan matakuliah atau perubahan bentuk pembelajaran dari perkuliahan di kampus menjadi kegiatan luar kampus yang dapat direkognisi. Dalam hal ini, kampus perlu memetakan bidang-bidang apa saja yang feasible dilaksanakan sesuai kondisi institusi dan situasi masing-masing. Hal lain yang perlu dipersiapkan pihak kampus adalah membuat kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait baik pemerintah, non pemerintah dan perusahaan dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, tugas tim penyusun kurikulum memperhitungkan jumlah sks rekognisi untuk setiap kegiatan bersama-sama pihak mitra.

Biasanya, setiap ada perubahan kebijakan selalu ada resitensi. Gebrakan Mendikbud dengan strategi “Merdeka Belajar” perlu diimbangi dengan gerak cepat para pimpinan Perguruan Tinggi dengan memulai gerakan perubahan mindset seluruh civitas akademika dan *stakeholder* serta perubahan kultur kampus yang merdeka untuk melakukan *eksperimen out of the box* dalam pengelolaan pembelajaran dan melaksanakan tri dharma lainnya. Mahasiswa juga perlu diberi pemahaman secara utuh sehingga dapat memanfaatkan “kemerdekaan” ini dalam menata masa depan yang lebih baik sesuai talentanya.

Menurut Rayandra Ahysar⁷, kebijakan “Merdeka Belajar” harus dimaknai tidak hanya sebagai kesempatan bagi mahasiswa memiliki bidang sesuai kebutuhannya, melainkan juga merupakan kesempatan yang baik bagi para pengelola Perguruan Tinggi untuk bereksperimen melakukan berbagai terobosan dan mengundang partisipasi semua pihak melalui kerjasama simbiosis, atau para dosen untuk berinovasi dalam pengelolaan pembelajaran. Sehingga diharapkan akan muncul kampus-kampus bermutu dengan para lulusan yang siap kerja dan siap membuka lapangan kerja.⁸

⁷ H. Rayandra Asyhar adalah Guru Besar Bidang Kimia dan Dosen Tetap FKIP Universitas Jambi, lulusan Technische Universitaet Braunschweig, Jerman.

Kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” yang dirilis oleh Kemendikbud tentunya mendapatkan beragam respon dari penyelenggara pendidikan tinggi tanah air. Respon positif umumnya berdatangan dari Perguruan Tinggi yang telah mapan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi. Mereka menganggap kebijakan baru ini seiring dengan kebijakan internal kampus yang telah dikembangkan selama ini, sehingga mudah untuk dikolaborasikan dengan kebijakan baru yang dirilis oleh Kemendikbud. Sebaliknya respon negatif umumnya berdatangan dari perguruan tinggi kecil, dimana kebijakan ini dinilai berpotensi “membunuh” mereka secara perlahan, dikarenakan persyaratan pembukaan program studi baru yang sangat memberatkan, dimana wajib melakukan kerjasama dengan program studi dari perguruan tinggi ternama untuk mendukung kinerja tri dharma dari program studi yang akan dibuka.

Paket kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela, misalnya pertama, dapat mengambil SKS (jam kegiatan) di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS), dan kedua dapat mengambil SKS pada Program Studi yang berbeda di Perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Dengan kata lain jumlah SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester, dan 3 semester sisanya diambil di luar program studinya.

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar program studi asalnya melalui program “Merdeka Belajar” di antaranya adalah: magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Paket kebijakan “Merdeka Belajar” bagi mahasiswa, salah satunya dapat diimplementasikan melalui “Pertukaran Pelajar” antar Lembaga Pendidikan Tinggi. Dalam tataran implementasinya, kebijakan ini akan menempatkan mahasiswa sebagai “konsumen strategis” yang ingin mencari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan, skill dan pengalaman yang belum maksimal diperolehnya pada program studi asalnya. Harapannya mahasiswa yang telah mengikuti program ini secara optimal akan memiliki kemampuan yang lebih baik dan berkarakter kuat, sehingga diharapkan memiliki bekal pengalaman dan pengetahuan yang lebih dan dapat menjadi lulusan yang lebih kompetitif.

Terdapat lima tantangan yang perlu diantisipasi oleh institusi pendidikan tinggi untuk mendukung kegiatan “Pertukaran Pelajar” sebagai salah satu implementasi kebijakan “Merdeka Belajar”, yaitu: *Pertama*: setiap program studi harus mampu mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan karakter yang kuat sebagai pencari sekaligus pembeda dengan program studi lainnya baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan harus mampu melakukan ‘branding’ sehingga dikenal dan menjadi daya tarik bagi mahasiswa dari luar kampusnya,

Kedua; setiap prodi harus didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran memadai yang secara optimal dapat mendukung keunggulan kompetitifnya dengan berbasis teknologi informatika, untuk dapat menunjang sistem pembelajaran jarak jauh mahasiswa dari luar institusinya, dan mampu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pendukung tri dharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal.

Ketiga; Setiap program studi harus memiliki Sumber Daya Manusia (dosen) yang unggul, didukung dengan rekam jejak pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang linear dan berkelanjutan, serta mendukung program unggulan yang telah dikembangkan, dan didukung dengan rencana induk penelitian yang sesuai unggulan program studi.

Keempat; setiap prodi harus terbuka melalui pengembangan informasi akademik berbasis website, dan harus memiliki SDM (tenaga kependidikan) yang handal untuk mewujudkan pelayanan prima sebagai pendukung kegiatan akademik yang berkelanjutan dan lebih bermutu.

Adapun tantangan teknis sekaligus menjadi peluang dari kegiatan “Pertukaran Pelajar” sebagai salah satu implementasi kebijakan “Merdeka Belajar” yang harus diantisipasi oleh institusi penyelenggara pendidikan tinggi, antara lain, yaitu: *Pertama*; peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tinggi sebagai prasyarat mutlak bagi mahasiswa yang ingin

melanjutkan pembelajaran lintas institusi. *Kedua*; mahasiswa yang ingin belajar di luar prodi, sudah harus memiliki perencanaan terkait kompetensi utama maupun kompetensi pendukung yang ingin diraih, sehingga menjadi tolak ukur program studi tujuan untuk dapat menerimanya.

Ketiga: persyaratan akademik bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar kampus asalnya, meliputi: standar nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kemampuan akademik dan non akademik pendukung, serta melalui mekanisme seleksi yang ketat secara internal, sebagai bentuk penjaminan mutu akademik dari mahasiswa yang akan mengambil kegiatan "Pertukaran Pelajar".

Keempat: syarat terpenting bagi mahasiswa yang belajar di luar Program Studinya dan atau di luar kampusnya, sebaiknya mendukung rencana risetnya di akhir studi, sehingga ada kewajiban kolaborasi riset mahasiswa di bawah bimbingan dosen antar program studi.

Dengan demikian, kebijakan "Merdeka Belajar" melalui kegiatan pertukaran pelajar, di satu sisi memberikan kebebasan akademik bagi mahasiswa untuk memilih program studi tujuannya, namun tetap pada batasan standar yang jelas dan terukur dengan berbagai persyaratan ideal yang harus dipenuhi, sehingga menghindari kebebasan akademik yang kebablasan dalam mengimplementasikan kegiatan "Pertukaran Pelajar" untuk mewujudkan program "Merdeka Belajar" yang dirilis oleh Kemendikbud.

Secara umum, program merdeka belajar ini perlu didukung semua pihak dengan melakukan sejumlah Kerjasama dari sejumlah pihak terkait. Kegiatan Kerjasama sakan saling menguntungkan setiap pihak. Paket Kebijakan "Merdeka Belajar" khususnya pertukaran pelajar yang digulirkan Kemendikbud adalah tantangan sekaligus peluang yang menguntungkan bagi penyelenggara pendidikan tinggi melalui jalinan kerjasama yang merupakan suatu keniscayaan. Strategi ini tentunya dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompetitif dan lebih berkarakter, sehingga menjadi solusi pembangunan bangsa. Sesuai visi Kemendikbud RI, yaitu: terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

KESIMPULAN

Wajah Pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah banyak mengalami perubahan, namun setiap perubahan tersebut belum dapat menjamin tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa ini sesuai dengan harapan pendiri negeri ini. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan setiap era pemerintahan selalu diikuti dengan kebijakan para pemimpin. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mampu diikuti secara keseluruhan oleh setiap pemangku kepentingan. Terkesan bahwa hanya bersifat konsumsi politik oleh sejumlah elit politik dan bergerak hanya pada hulu sedangkan hilir tidak terlaksana dengan baik.

Terdapat keluhan dari sejumlah kalangan mengenai kebijakan yang setiap saat mengalami perubahan karena sesungguhnya apapun kebijakan itu belum seluruhnya menyentuh seluruh elemen masyarakat. Contoh yang paling sering dikeluhkan masyarakat yaitu, mahal biaya Pendidikan, kurangnya Sumber Daya Manusia (guru) yang berkompeten dan berdedikasi tinggi, kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai. Dari berbagai keluhan tersebut, mengakibatkan munculnya pendapat di masyarakat bahwa Pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh orang kaya, orang peranakan sedangkan kaum miskin dan marginal hampir tidak dapat. Sekalipun anak-anak orang miskin dan terpinggirkan dapat sekolah, itupun hanya menghindari buta aksara semata, tetapi belum tentu kualitas layanannya sama.

Pemerintah perlu hadir dan mengajak semua komponen masyarakat dalam mengelola dan memperbaiki system Pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan Agama Kristen sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat juga perlu diberi tempat yang selayaknya dalam sistem pendidikan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Boehlke, Robert R. 2016. *Sejarah Perkembangan Pikiran & Praktek Pendidikan Agama Kristen (1)*. Jakarta: BPK GM.
- Boehlke, Robert R. 2016. *Sejarah Perkembangan Pikiran & Praktek Pendidikan Agama Kristen (2)*. Jakarta: BPK GM.
- Cully, Iris V. 2015. *Dinamika Pendidikan Kristen*. Jakarta: BPK GM
- Berkhof, Louis dan Van Til, Cornelius. 2018. *Dasar Pendidikan Kristen*. Surabaya: Momentum.
- Wijaya, Hengki. 2018. "Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Berbasis Media Sosial". *Jurnal Jaffray*, Vol.16, No.2.
- Yang, Fery. 2018. *Pendidikan Kristen*. Surabaya: Momentum
